



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: IV (empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Badan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 April 2018.
Pukul	: 19.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra.,M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Laporan Ikhtisar hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017; 2. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN Tahun Anggaran 2018; 3. Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fesyen (K2F) Tahun 2017; 4. Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fesyen (K2F) Tahun 2018; 5. <i>Grand Design</i> dan Pelaksanaan sistem <i>box office terintegrasi</i> ; 6. Lain-lain
Hadir	: 35 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Triawan Munaf/Kepala Bekraf RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.44 WIB oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dan pandangan dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017;

1. Kepala Bekraf RI menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2017 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI sehingga belum memperoleh hasil yang final.
2. Terkait proses pemeriksaan oleh BPK RI sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, Kepala Bekraf RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 Maret 2018 telah melakukan rapat tiga pihak (*tripartite*) antara Kemenkeu RI, BPK RI dan Bekraf RI yang menghasilkan nota kesepakatan yang sifatnya sementara mengingat beberapa hal yang belum disepakati:
 - 1) Terdapat rincian utang/tunggakan yang masih perlu konfirmasi kembali.
 - 2) Perlu dilakukan konfirmasi BAST atas persediaan untuk diserahkan sebagai dasar koreksi.
 - 3) Terdapat koreksi/reklasifikasi peralatan dan mesin serta ATB yang perlu diuji dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN.
 - b. Pada tanggal 4 April 2018 dilakukan kembali rapat tiga pihak (*tripartite*) sebagai tindak lanjut rapat tiga pihak (*tripartite*) yang pertama tanggal 28 Maret 2018, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Bekraf RI menyetujui akan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Tahun 2017 beserta rinciannya secara lengkap.

B. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN Tahun Anggaran 2018;

Realisasi penyerapan APBN TA 2018 sampai minggu ketiga bulan April 2018 adalah sebesar Rp129,204,278,829,- (*seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 17,32 % dari pagu APBN Bekraf TA 2018.

Catatan: *angka realisasi sudah ditambahkan dengan Outstanding kontrak pada belanja barang.*

C. Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fesyen (K2F) Tahun 2017;

Pada tahun 2017 Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fesyen yang dilaksanakan Bekraf RI antara lain;

- 1) Kuliner: *Food Startup Indonesia, Kreatifood, Sertifikasi Profesi Barista, Desain Restoran di Destinasi Wisata Prioritas, Festival Kopi dan Soto Mendunia.*
- 2) Kriya: *IKKON, Inacraft, Sertifikasi Profesi Batik, IDentities, Bekraf Creative Labs, dan Futurecraft.*
- 3) Fesyen: *Bekraf Kreatif Labs, ORBIT, Indonesia Fashion Week, KOPIKKON, Adi Wastra, dan Jakarta Fashion Week.*

D. Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fesyen (K2F) Tahun 2018;

Pelaksanaan program unggulan K2F Tahun 2018 dilaksanakan di beberapa Deputi, antara lain:

1. Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan: *Muslim Fashion Festival*;
2. Deputi Akses Permodalan: *Food Startup Indonesia*;
3. Deputi Infrastruktur: Bantuan Pemerintah;
4. Deputi Pemasaran: *Adiwastra dan Indonesia Fashion Week*;
5. Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi: Fasilitasi Sertifikasi Profesi Barista dan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Pembatik.

E. *Grand Design* dan Pelaksanaan sistem *box office terintegrasi*;

1. Bekraf RI menjelaskan bahwa setiap bioskop memiliki alat pendukung berupa sistem pelaporan tiket bioskop terpadu (*integrated box office system*), yaitu metode pencatatan penjualan tiket bioskop secara daring dari setiap layar pertunjukan dalam waktu berjalan, yang dikelola oleh Kemendikbud RI.
2. Tata cara pemberitahuan jumlah penonton kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dapat dilakukan melalui sistem pelaporan tiket bioskop terpadu (*integrated box office system*), yang meliputi jumlah penjualan tiket dan pendapatan kotor per-judul film per-pertunjukan per-lokasi pertunjukan, baik film lokal maupun impor.

F. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI adalah sbb:

1. Komisi X DPR RI mendesak Bekraf RI untuk segera menyelesaikan laporan keuangan Tahun 2017 berdasarkan kesepakatan rapat tiga pihak (*tripartite*) antara Kemenkeu RI, BPK RI dan Bekraf RI pada tanggal 4 April 2018. Laporan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan tersebut di atas akan disampaikan ke Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 30 Mei 2018.
2. Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI berkoordinasi dengan Kemendikbud RI untuk menyusun *Grand Design* menjadikan film Indonesia berjaya di negeri sendiri.
3. Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif.
4. Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI, sesuai tugas dan fungsinya untuk berkoordinasi dengan K/L lain dan berpartisipasi secara aktif untuk ikut menyukseskan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang.
5. Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian yang ditunjuk oleh Presiden sesuai Surpres Nomor : R-30/Pres/05/2016 dalam rangka pembahasan RUU Tentang Ekonomi Kreatif.
6. Komisi X DPR RI mengharapkan Bekraf RI untuk:
 - a. Menyampaikan rincian daya serap pelaksanaan anggaran TA 2017 secara komprehensif (berdasarkan fungsi, jenis belanja, dan rincian per-deputi);
 - b. Menyampaikan laporan secara komprehensif capaian-capaian program unggulan, program prioritas dan program lainnya dari tahun 2016-2017;

- c. Menyampaikan rincian database kegiatan Bekraf RI Tahun 2018, setidaknya meliputi waktu, tempat dan jenis kegiatan;
 - d. Melibatkan Komisi X DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan Bekraf RI sesuai peraturan yang berlaku.
7. Data sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a,b, dan c agar diserahkan kepada Komisi X DPR RI paling lama tanggal 15 Mei 2018.
 8. Komisi X DPR RI meminta kepada Bekraf RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI dan diserahkan paling lama tanggal 15 Mei 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **23.00** WIB

KEPALA BEKRAF RI



TRIAWAN MUNAF

KETUA RAPAT,



Ir.H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA,MM